



LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB WONOGIRI

DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
Tahun 2026



IMIPAS PRIMA
PELAYANAN LUAR BIASA



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI

NOMOR : WP13.PAS28.OT.01.03 – 1626 TAHUN 2026

TENTANG

DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menunjang pencapaian kinerja, dibutuhkan mekanisme mengurangi risiko dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri tentang Dokumen Manajemen Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-27.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
9. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-20 Tahun 2025 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-47 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI TENTANG DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOGIRI TAHUN 2026.

KESATU : Dokumen Manajemen Risiko sebagaimana dalam lampiran keputusan ini merupakan daftar risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang harus diantisipasi melalui pengendalian risiko;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wonogiri

Pada Tanggal : 11 Februari 2026

Kepala,



Siswarno

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
Periode Penerapan : 2026

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan	Klasifikasi Resiko
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Petugas dapur belum bersertifikasi pelatihan tata boga dan ilmu gizi	Risiko terkait pelayanan
			Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Jaminan kesehatan WBP (BPJS dsb.) sudah tidak aktif	Risiko terkait pelayanan
			Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	Layanan kesehatan maternal sangat terbatas	Risiko terkait pelayanan
			Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Belum adanya petugas khusus (psikolog/psikiater) yang menangani WBP dengan gangguan jiwa	Risiko terkait pelayanan
			Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Belum tersedia ruang perawatan kesehatan khusus bagi WBP lansia	Risiko terkait pelayanan
			Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Terbatasnya sarana prasarana untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda dan toilet untuk disabilitas di dalam blok hunian	Risiko terkait pelayanan
			Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Terbatasnya ruang isolasi untuk penyakit menular	Risiko terkait pelayanan
				Terbatasnya anggaran untuk ODHA yang memulai pengobatan ARV	Risiko terkait pelayanan
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	Terbatasnya jumlah petugas yang berkompeten dalam bidang penanganan narkotika dan rehabilitasi	Risiko terkait pelayanan
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	Belum semua narapidana mengikuti kegiatan pembinaan kepribadian yang diselenggarakan lapas dengan maksimal	Risiko terkait tusi
			Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Terdapat register F dan gagal Integrasi serta keterlambatan pengusulan dari UPT sebelumnya	Risiko terkait tusi
			Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Terdapat register F dan gagal Integrasi serta keterlambatan pengusulan dari UPT sebelumnya	Risiko terkait tusi

			Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Lapas belum menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal	Risiko terkait tusi
			Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Belum adanya metode deradikalisasi yang efektif	Risiko terkait tusi
			Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Terbatasnya jumlah narapidana yang dapat memperoleh pelatihan	Risiko terkait tusi
			Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Sarana / peralatan kerja Narapidana belum me	Risiko terkait tusi
				Belum stabilnya pemasaran hasil produksi warga binaan pemasyarakatan	Risiko terkait tusi
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Data dukung pengaduan kurang lengkap	Risiko terkait pelayanan
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Kurangnya sarana dan prasarana keamanan yang memadai	Risiko terkait tusi
				SOP pengamanan belum dilaksanakan secara optimal	Risiko terkait tusi
			Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Kurangnya kedisiplinan narapidanan untuk menaati peraturan yang berlaku di lapas	Risiko terkait tusi
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya jumlah petugas dan kemampuan/kompetensi petugas pengamanan untuk menangani gangguan kamtib secara tuntas	Risiko terkait tusi
	2 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen kerja	Risiko terkait tusi
				Ganggguan sistem dalam aplikasi SAKTI	Risiko terkait tusi
			Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	Sarana dan prasarana kurang mendukung	Risiko terkait tusi
				Pemanfaatan BMN yang kurang sesuai dengan ketentuan	Risiko terkait tusi
				Tidak sinkronnya data BMN dengan BMN yang ada dilapangan	Risiko terkait tusi

			Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya minat pegawai untuk mengembangkan kompetensi	Risiko terkait tusi
			Tersusunnya Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Ada pegawai yang belum bisa naik pangkat karena belum ada Uji Kompetensi Kenaikan jenjang	Risiko terkait tusi
				Proses Lelang masih berjalan sehingga Rencana Penarikan Anggaran tidak sesuai dengan Rencana yang dibuat	Risiko terkait tusi
			Jumlah Layanan Perkantoran	Kurangnya kompetensi pegawai dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran	Risiko terkait tusi
				Kurang memadainya ruang layanan untuk masyarakat	Risiko terkait pelayanan
				Belum adanya ruang penyimpanan arsip	Risiko terkait tusi
				Kurangnya disiplin pegawai dalam menerapkan SOP pada melaksanakan tugas	Risiko terkait integritas



Wonogiri, 11 Februari 2026
Kepala,

Siswarno

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Wonogiri
Periode Penerapan : 2026

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Resiko	Kriteria Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U	Uraian	Pihak yang			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	Petugas dapur belum bersertifikasi pelatihan tata boga dan ilmu gizi	Narapidana/WBP tidak memperoleh gizi yang cukup	Kasi Binadik & Giatja	Kurangnya pelatihan tata boga untuk petugas dapur dan Narapidana yang menjadi tamping dapur	Internal	C	Narapidana/WBP rentan terkena gangguan kesehatan terutama gangguan pencernaan	Satuan Kerja	Melakukan pengawasan dan pendampingan narapidana yang bertugas memasak; Menerapkan menu 10 hari sesuai dengan Permenkumham no. 40 tahun 2017;	Tidak Ada	Risiko Operasional
2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	Jaminan kesehatan WBP (BPJS dsb.) sudah tidak aktif	Munculnya beban Biaya perawatan WBP di rumah sakit/faskes	Kasi Binadik & Giatja	Kurangnya kepedulian WBP dan Keluarga WBP terkait Jaminan kesehatan	Eksternal	UC	Lapas harus menanggung biaya perawatan narapidana/WBP yang tidak tercover oleh jaminan kesehatan	Kementerian	Pendataan Jaminan Kesehatan yang dimiliki WBP	Munculnya beban biaya perawatan WBP di rumah sakit/faskes	Risiko Operasional
3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses	Layanan kesehatan maternal sangat terbatas	Potensi gangguan kehamilan pada narapidana	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi	Internal	C	Ibu dan bayi mengalami masalah kesehatan	Individu	Tidak terdapat Narapida/WBP yang hamil dan/atau menyusui	Tidak Ada	Risiko Operasional
4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	Belum adanya petugas khusus (psikolog/psikiater) yang menangani WBP dengan gangguan jiwa	Potensi gangguan mental pada Narapidana/ WBP semakin parah	Kasi Binadik & Giatja	Belum adanya petugas yang berkompeten seperti psikolog/psikiater	Eksternal	UC	Narapidana mengalami masalah kesehatan mental yang semakin parah	Kementerian	Bekerjasama dengan pihak ke tiga yang mempunyai spesialisasi penanganan gangguan kejiwaan dan merujuk Narapidana ke rumah sakit jiwa	Potensi gangguan mental pada Narapidana/WBP semakin parah	Risiko Operasional
5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Belum tersedia ruang perawatan kesehatan khusus bagi WBP lansia	Potensi tidak tertanganinya lansia yang sakit	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya ruang perawatan yang ada	Internal	C	Lansia rentan tertular penyakit lain dan sakit bertambah parah	Satuan Kerja	Narapidana lansia di prioritaskan untuk mendapatkan pelayanan dan ditempatkan di kamar khusus	Potensi tidak tertanganinya lansia yang sakit	Risiko Operasional
6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Terbatasnya sarana prasarana untuk penyandang disabilitas seperti kursi roda dan toilet untuk disabilitas di dalam blok hunian	Potensi terjadinya kecelakaan Narapidana/WBP penyandang disabilitas	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana khusus untuk penyandang disabilitas	Eksternal	UC	Penyandang disabilitas terluka, sakit, dan sulit melakukan aktivitas	Kementerian	Narapidana disabilitas di prioritaskan untuk mendapatkan pelayanan dan ditempatkan di satu kamar; melakukan kerjasama (CSR) untuk pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas	Potensi terjadinya kecelakaan Narapidana/WBP penyandang disabilitas	Risiko Operasional

7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	Terbatasnya ruang isolasi untuk penyakit menular (TB)	Potensi Bakteri TB mudah menular terhadap warga binaan lain	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya ruangan yang ada untuk isolasi narapidana yang mengidap penyakit menular (TB)	Internal	C	Narapidana lain beresiko mudah tertular penyakit TB	Satuan Kerja	Dilakukan monitoring berkala oleh tim medis; ditempatkan di ruang khusus; bekerja sama dengan dinas kesehatan/rumah sakit terkait pengobatan	Potensi Bakteri TB mudah menular terhadap warga binaan lain	Risiko Operasional
		Terbatasnya anggaran untuk ODHA yang memulai pengobatan ARV	Narapidana dengan ODHA terlambat memperoleh terapi ARV	Kasi Binadik & Giatja	Belum adanya anggaran khusus untuk pemeriksaan kesehatan penunjang ODHA	Eksternal	UC	Inisiasi terapi ARV menjadi sulit dilaksanakan	Kementerian	Untuk ODHA yang memiliki biaya/asuransi kesehatan/keluarga, sebagian biaya dibebankan kepada yang bersangkutan/keluarga	Narapidana dengan ODHA terlambat memperoleh terapi ARV	Risiko Operasional
8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	Terbatasnya jumlah petugas yang berkompeten dalam bidang penanganan narkotika dan rehabilitasi	Potensi Narapidana penyalah guna narkotika tidak tertangani dengan baik	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya pelatihan untuk petugas mengenai penanganan penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi	Eksternal	UC	Kualitas hidup narapidana penyalahgunaan narkotika menjadi rendah	Kementerian	Menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga terkait rehabilitasi dan penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayah banyumas; Diklat petugas terkait rehabilitasi	Tidak Ada	Risiko Operasional
9	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian	Belum semua narapidana mengikuti kegiatan pembinaan kepriadian yang diselenggarakan lapas	Beberapa WBP kurang aktif mengikuti pembinaan	Kasi Binadik & Giatja	Kegiatan pembinaan kurang menarik dan pada waktu kegiatan sedang melaksanakan tugas yang lain	Internal	C	WBP menjadi tidak aktif dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan yang ada	Satuan Kerja	Pelaksanaan kegiatan pembinaan yang menarik dan diumumkan sebelumnya serta diingatkan kembali sebelum kegiatan	Terdapat WBP yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembinaan	Risiko Operasional
10	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	Terdapat register F dan gagal Integrasi serta keterlambatan pengusulan dari UPT sebelumnya	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan remisi	Kasi Binadik & Giatja	Terjadi pelanggaran di UPT Pemasarakatan sebelumnya	Eksternal	UC	WBP terlambat atau tidak menerima integrasi dalam waktu tertentu	Kementerian	Subsi Registrasi dan Bimkemas aktif untuk mengusulkan remisi	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan remisi	Risiko Operasional
11	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	Terdapat register F dan gagal Integrasi serta keterlambatan pengusulan dari	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan integrasi	Kasi Binadik & Giatja	Terjadi pelanggaran di UPT Pemasarakatan sebelumnya	Eksternal	UC	WBP terlambat atau tidak menerima integrasi dalam waktu tertentu	Kementerian	Subsi Registrasi dan Bimkemas aktif untuk mengusulkan integrasi	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan integrasi	Risiko Operasional
12	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	Lapas belum menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal	WBP kurang mendapatkan pengetahuan dan ilmu untuk mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan kegiatan pendidikan formal di lapas	Eksternal	UC	WBP tidak memiliki skill untuk kembali ke masyarakat setelah bebas	Kementerian	Diadakan perbaikan dan peningkatan layanan perpustakaan sebagai sumber belajar mandiri bagi WBP	WBP kurang mendapatkan pengetahuan dan ilmu untuk mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki	Risiko Operasional
13	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Bertanggung Jawab, dan Disiplin	Belum adanya metode deradikalisasi yang efektif	Narapidana resiko tinggi lambat dalam proses pembinaan	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya referensi dan pelatihan terkait hal narapidana resiko tinggi	Eksternal	C	Narapidana cenderung berlaku arogan dan rentan menularkan faham yang dianut	Satuan Kerja	Mencari referensi terkait	Tidak terdapat narapidana resiko tinggi	Risiko Operasional

14	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	Terbatasnya jumlah narapidana yang dapat memperoleh pelatihan	Skill yang dimiliki WBP kurang dan tidak berkembang	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan	Eksternal	UC	Skill yang dimiliki WBP kurang dan tidak berkembang	Kementerian	Pengajuan permintaan pengadaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan vokasi bersertifikasi	Narapidana tidak memiliki kemampuan dan sertifikat keahlian untuk digunakan saat kembali ke masyarakat	Risiko Operasional
15	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	Sarana / peralatan kerja Narapidana belum memadai	Produktivitas kerja narapidana menurun	Kasi Binadik & Giatja	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasana kerja	Eksternal	UC	Proses kegiatan kerja napi tidak berjalan dengan baik dan kurang produktif	Kementerian	Pemanfaatan peralatan kerja yang ada dan memberikan pelatihan bimbingan kerja kepada narapidana, pengusulan pengadaan sarana dan prasarana kerja narapidana	Produktivitas kerja narapidana menurun	Risiko Operasional
		Belum stabilnya pemasaran hasil produksi warga binaan pemasyarakatan	Tidak tersalurkan produk warga binaan pemasyarakatan kepada customer	Kasi Binadik & Giatja	Produk warga binaan pemasyarakatan belum mencapai standar kualitas yang baik	Internal	C	Terjadinya kerugian karena produk tidak laku, Target PNBP tidak terpenuhi.	Kantor Wilayah	Memasarkan produk hasil warga binaan pemasyarakatan melalui media sosial mengadakan studi banding ke UPT lain	Tidak tersalurkan produk warga binaan pemasyarakatan kepada customer	Risiko Operasional
16	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Data dukung pengaduan kurang lengkap	Tertundanya penyelesaian pengaduan masyarakat	Kasi Adm. Kamtib	Kurangnya informasi mengenai mekanisme pengaduan	Eksternal	UC	Pengaduan terlambat diproses dan diselesaikan	Kementerian	Melaksanakan sosialisasi terhadap Narapidana dan masyarakat tentang berbagai sarana pengaduan masyarakat	Tertundanya penyelesaian pengaduan masyarakat	Risiko Operasional
17	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	Kurangnya sarana dan prasarana keamanan yang memadai	Tidak diperpanjangnya masa izin penggunaan senjata api (untuk pengamanan)	Kasi Adm. Kamtib	Petugas tidak melakukan pengecekan secara berkala terkait izin penggunaan senjata api	Internal	C	Tidak dapat digunakannya senjata sebagai sarana pengamanan sehingga kegiatan pengamanan tidak dapat berjalan	Satuan Kerja	Penerapan SOP keamanan, melakukan inventarisasi dan perawatan senjata secara rutin dan berkala	Tidak diperpanjangnya masa ijin penggunaan senjata api (untuk pengamanan)	Risiko Operasional
		SOP pengamanan belum dilaksanakan secara optimal	Terjadinya gangguan kamtib (pelarian, perkelahian, kerusuhan dan peredaran barang barang terlarang)	Kasi Adm. Kamtib dan Ka. KPLP	Kurangnya sarana dan prasarana keamanan dan sarana pengeledahan	Internal	C	Penggunaan barang barang terlarang yang meimbulkan gangguan kamtib; Kondisi lapas tidak kondusif ; Penurunan penilaian baik masyarakat	Satuan Kerja	Melaksanakan kegiatan intelijen dan memberikan sosialisasi terhadap Narapidana terkait barang barang terlarang dalam blok hunian	Terjadinya gangguan kamtib (pelarian, perkelahian, kerusuhan dan peredaran barang barang terlarang)	Risiko Operasional
18	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	Kurangnya kedisiplinan narapidanan untuk menaati peraturan yang berlaku di lapas	Risiko terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana	Kasi Adm. Kamtib dan Ka. KPLP	Kurangnya kesadaran narapidana untuk mematuhi peraturan yang berlaku	Internal	C	Kondisi lapas menjadi rawan dan tidak kondusif	Satuan Kerja	SOP, serta hukuman disiplin bagi yang melakukan pelanggaran, Melakukan pendekatan secara persuasif terhadap Narapidanan kegiatan kontrol keliling blok baik petugas pengamanan ataupun staff KPLP	Risiko terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana	Risiko Operasional

19	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Terbatasnya jumlah petugas dan kemampuan/kompetensi petugas pengamanan untuk menangani gangguan kamtib secara tuntas	Terjadinya pengulangan gangguan keamanan kamtib yang berkembang semakin buruk	Kasi Adm. Kamtib dan Ka. KPLP	Jumlah pegawai yang kurang sepadan dengan jumlah narapidana dan kompetensi pegawai yang masih kurang merata untuk menangani gangguan kamtib	Eksternal	UC	Kondisi lapas menjadi rawan dan tidak kondusif	Eselon 1	SOP, serta hukuman disiplin bagi yang melakukan pelanggaran, Pemulihan kondisi keamanan pasca adanya gangguan keamanan dan ketertiban agar segera dilaksanakan dan dikerjakan sampai tuntas agar tidak timbul kembali gangguan kamtib yang lain	Terjadinya pengulangan gangguan keamanan kamtib yang berkembang semakin buruk	Risiko Operasional
20	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan	Keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen kerja	Potensi program yang direncanakan tidak dapat terealisasi tepat waktu	Kasubbag TU	Penyampaian informasi yang mendadak	Eksternal	UC	Adanya kegiatan kerja yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana	Kantor Wilayah	Berkoordinasi dengan kantor wilayah	Potensi program yang direncanakan tidak dapat terealisasi tepat waktu	Risiko Operasional
		Gangguan sistem dalam aplikasi SAKTI	Dokumen rencana kerja tidak terinput secara tepat waktu	Kasubbag TU	Sistem aplikasi SAKTI mengalami gangguan akses	Eksternal	UC	Keterlambatan penyampaian dokumen rencana kerja	Kantor Wilayah	Menyusun dokumen rencana kerja manual	Dokumen rencana kerja tidak terinput secara tepat waktu	Risiko Operasional
21	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangga	Sarana dan prasarana kurang mendukung	Terdapat BMN yang rusak dan hilang	Kasubbag TU	Kurangnya kontrol dari penanggung jawab DBR	Internal	C	Terhambatnya penggunaan dan prasaran penunjang kegiatan perkantoran dan lingkungan	Satuan Kerja	Sudah mengusulkan pengadaan melalui RKBMN	Terdapat BMN yang rusak dan hilang	Risiko Operasional
		Pemanfaatan BMN yang kurang sesuai dengan ketentuan	Terlambatnya Pengajuan SK Persetujuan Sewa BMN	Kasubbag TU	Menumpuknya berkas pengajuan sewa dari UPT seluruh UPT ke pusat	Internal	C	Terlambatnya PNBPN yang diterima Negara dari Sewa BMN	Unit Eselon 1	Melakukan Komunikasi Intensif dengan Pusat untuk Monitoring Progres Berkas	Terlambatnya Pengajuan SK Persetujuan Sewa BMN	Risiko Operasional
		Tidak sinkronnya data BMN dengan BMN yang ada dilapangan	Potensi adanya kekurangan BMN saat dilakukan monitoring	Kasubbag TU	Kurangnya monitoring BMN yang dilakukan secara rutin	Internal	C	Penggantian BMN yang kurang	Satuan kerja	Dilaksanakan monitoring dan pemeriksaan BMN secara rutin	Potensi adanya kekurangan BMN saat akan dilakukan monitoring	Risiko Operasional
22	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pamarayakatan	Kurangnya minat pegawai untuk mengembangkan kompetensi	Banyak pegawai yang tidak memiliki kompetensi penunjang kegiatan kerja	Kasubbag TU	Kurangnya kesadaran pegawai dalam hal ini ada aktualisasi diri dan peningkatan kompetensi	Internal	C	Produktifitas dan kualitas kerja pegawai kurang; menghambat tercapainya tujuan organisasi	Satuan Kerja	Melakukan inventarisir pegawai dan dukungan untuk peningkatan kompetensi pegawai	Banyak pegawai yang tidak memiliki kompetensi penunjang kegiatan kerja	Risiko Operasional
		Ada pegawai yang belum bisa naik pangkat karena belum ada Uji Kompetensi Kenaikan jenjang	Kenaikan pangkat tertunda	Kasubbag TU	Belum ada uji kompetensi terkait kenaikan jenjang	Eksternal	UC	Menghambat pengembangan karir pegawai	Individu	Sudah melakukan koordinasi ke kantor wilayah	Belum terlaksananya kenaikan pangkat	Risiko Operasional

23	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Proses Lelang masih berjalan sehingga Rencana Penarikan Anggaran tidak sesuai dengan Rencana yang	Penyerapan anggaran dan nilai IKPA belum maksimal	Kasubbag TU	SK Pokmil masih dalam proses yang mengakibatkan proses lelang baru dimulai	Eksternal	UC	Persentase penyerapan anggaran belum maksimal	Satuan Kerja	Selalu berkoordinasi dengan kantor wilayah dan melengkapi data dukung yang diperlukan	Penyerapan anggaran dan nilai IKPA belum maksimal	Risiko Operasional
		Kurangnya kompetensi pegawai dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban	Terlambatnya proses realisasi anggaran	Kasubbag TU	Adanya pegawai yang tidak melakkan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran	Internal	C	Disbursement plan tidak terlaksana tepat waktu	Satuan Kerja	Melaksanakan pertanggung jawaban penyusunan anggaran tepat waktu	Terlambatnya proses realisasi anggaran	Risiko Operasional
24	Jumlah Layanan Perkantoran	Kurang memadainya ruang layanan untuk masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang ada	Kasubbag TU	Kurangnya fasilitas kelengkapan untuk ruang pelayanan masyarakat	Internal	C	Tidak maksimalnya kenyamanan pelayanan kepada masyarakat sehingga citra	Satuan Kerja	Mengoptimalkan perbaikan ruangan layanan masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang ada	Risiko Operasional
		Belum adanya ruang penyimpanan arsip	Risiko arsip penting rusak	Kasubbag TU	Tidak adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip	Internal	C	Arsip tidak tersedia saat hendak digunakan; Kegiatan kerja lain yang	Satuan Kerja	Adanya penyimpanan arsip secara digital melalui google drive dan sumaker	Risiko arsip penting rusak	Risiko Operasional
		Kurangnya disiplin pegawai dalam menerapkan SOP pada pelaksanaan tugas	Pegawai melakukan pungli dan memasukkan barang barang terlarang ke	Kasubbag TU	Kurangnya integritas pegawai	Internal	C	Terjadinya pungli dan adanya barang-barang terlarang masuk ke dalam blok hunian	Kementerian	Peningkatan kontrol keluar masuk pegawai serta barang ke dalam Lapas	Pegawai melakukan pungli dan memasukkan barang barang terlarang ke	Risiko Operasional



Wonogiri, 11 Februari 2026

Kepala,

Siswarno

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
Periode Penerapan : 2026

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Munculnya beban biaya perawatan WBP di rumah sakit/faskes	Kecil	2	Kurangnya kepedulian WBP dan keluarganya terkait jaminan kesehatan	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
2	Potensi gangguan mental pada Narapidana/WBP semakin parah	Hampir Pasti	4	Belum adanya petugas khusus yang berkompeten, misal : psikolog/psikiater	Satuan Kerja	2	8	Rendah
3	Potensi tidak tertanganinya lansia yang sakit	Hampir Pasti	4	Keterbatasan ruang fasilitas dan ruang perawatan	Satuan Kerja	2	8	Rendah
4	Potensi terjadinya kecelakaan Narapidana/WBP penyandang disabilitas	Hampir Pasti	4	Keterbatasan anggaran pengadaan fasilitas dan sarana prasarana khusus bagi penyandang disabilitas	Satuan Kerja	2	8	Rendah
5	Potensi Bakteri TB mudah menular terhadap warga binaan lain	Hampir Pasti	4	Terbatasnya ruangan yang ada untuk isolasi narapidana yang mengidap penyakit menular (TB)	Satuan Kerja	2	8	Rendah
6	Narapidana dengan ODHA terlambat memperoleh terapi ARV	Moderat	3	Belum adanya anggaran khusus untuk pemeriksaan kesehatan penunjang ODHA	Kementerian	5	15	Sedang
7	Terdapat WBP yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembinaan	Kecil	2	Kegiatan pembinaan kurang menarik dan pada waktu kegiatan sedang melaksanakan kegiatan lain	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
8	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan remisi	Kecil	2	WBP melakukan pelanggaran pada periode sebelumnya	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
9	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan integrasi	Kecil	2	WBP melakukan pelanggaran pada periode sebelumnya	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
10	WBP kurang mendapatkan pengetahuan dan ilmu untuk mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki	Hampir Pasti	4	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan kegiatan pendidikan formal	Kementerian	5	20	Tinggi
11	Narapidana tidak memiliki kemampuan dan sertifikat keahlian untuk digunakan saat kembali ke masyarakat	Moderat	3	Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pelatihan vokasi bersertifikasi	Satuan Kerja	2	6	Rendah
12	Produktivitas kerja narapidana menurun	Moderat	3	Terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana kerja	Satuan Kerja	2	6	Rendah
13	Tidak tersalurkan produk warga binaan pemasyarakatan kepada customer	Moderat	3	Produk warga binaan pemasyarakatan belum mencapai standar kualitas yang baik	Kantor Wilayah	3	9	Rendah
14	Tertundanya penyelesaian pengaduan masyarakat	Moderat	3	Kurangnya informasi mengenai mekanisme pengaduan	Kementerian	5	15	Sedang
15	Tidak diperpanjangnya masa ijin penggunaan senjata api (untuk pengamanan)	Moderat	3	Pengecekan secara berkala terhadap izin penggunaan senjata api tidak dilakukan dengan baik	Kementerian	5	15	Sedang
16	Terjadinya gangguan kamtib (pelarian, perkelahian, kerusuhan dan peredaran barang barang terlarang)	Moderat	3	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang keamanan dan penggeledahan	Kementerian	5	15	Sedang
17	Risiko terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana	Moderat	3	Kurangnya kesadaran narapidana untuk mematuhi peraturan yang berlaku	Eselon 1	4	12	Sedang
18	Terjadinya pengulangan gangguan keamanan kamtib yang berkembang semakin buruk	Moderat	3	Jumlah pegawai yang kurang sepadan dengan jumlah narapidana dan kompetensi pegawai yang masih kurang merata untuk menangani gangguan kamtib	Eselon 1	4	12	Sedang

19	Potensi program yang direncanakan tidak dapat terealisasi tepat waktu	Hampir Pasti	4	Penyampaian informasi yang mendadak	Kantor Wilayah	5	20	Tinggi
20	Dokumen rencana kerja tidak terinput secara tepat waktu	Hampir Pasti	4	Gangguan akses dan/atau jaringan pada aplikasi SAKTI	Kantor Wilayah	5	20	Tinggi
21	Terdapat BMN yang rusak dan hilang	Moderat	3	Kurangnya kontrol dari penanggung jawab DBR	Satuan Kerja	2	6	Rendah
22	Terlambatnya Pengajuan SK Persetujuan Sewa BMN	Kecil	2	Menumpuknya berkas pengajuan sewa dari seluruh UPT ke pusat	Eselon 1	4	8	Rendah
23	Potensi adanya kekurangan BMN saat akan dilakukan monitoring	Hampir Pasti	4	Kurangnya monitoring dan inventarisasi BMN yang dilaksanakan secara rutin	Satuan Kerja	2	8	Rendah
24	Banyak pegawai yang tidak memiliki kompetensi penunjang kegiatan kerja	Kecil	2	Kurangnya kesadaran pegawai terkait dengan aktualisasi dan peningkatan kompetensi	Satuan Kerja	2	4	Sangat Rendah
25	Belum terlaksananya kenaikan pangkat	Pasti	5	Pegawai bersangkutan belum/terlambat mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat	Individu	1	5	Sangat Rendah
26	Penyerapan anggaran dan nilai IKPA belum maksimal	Moderat	3	Keterlambatan proses penerbitan SK, berakibat pada keterlambatan proses secara keseluruhan	Satuan Kerja	2	6	Rendah
27	Terlambatnya proses realisasi anggaran	Hampir Pasti	4	Adanya pegawai yang tidak/lambat melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Satuan Kerja	2	8	Rendah
28	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang ada	Hampir Pasti	4	Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana pelayanan	Satuan Kerja	2	8	Rendah
29	Risiko arsip penting rusak	Hampir Pasti	4	Tidak adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip	Satuan Kerja	2	8	Rendah
30	Pegawai melakukan pungli dan memasukkan barang barang terlarang ke lapas	Hampir Pasti	4	Pegawai kurang berintegritas	Kementerian	5	20	Tinggi



Wonogiri, 11 Februari 2026
Kepala,

Siswano

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
 Periode Penerapan : 2026

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Munculnya beban biaya perawatan WBP di rumah sakit/faskes	4	30	2	Persentase munculnya beban biaya perawatan	5%
2	Potensi gangguan mental pada Narapidana/WBP semakin parah	8	16	6	Jumlah narapidana pengidap gangguan mental semakin parah	5
3	Potensi tidak tertanganinya lansia yang sakit	8	15	6	Persentase tidak tertanganinya lansia sakit	5%
4	Potensi terjadinya kecelakaan Narapidana/WBP penyandang disabilitas	8	17	6	Persentase terjadinya kecelakaan pada narapidana penyandang disabilitas	5%
5	Potensi Bakteri TB mudah menular terhadap warga binaan lain	8	14	6	Persentase penularan bakteri TB	5%
6	Narapidana dengan ODHA terlambat memperoleh terapi ARV	15	9	10	Jumlah narapidana ODHA yang terlambat memperoleh terapi ARV	3
7	Terdapat WBP yang kurang aktif mengikuti kegiatan pembinaan	4	29	2	Persentase keaktifan WBP dalam mengikuti kegiatan pembinaan	90%
8	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan remisi	4	27	2	Jumlah narapidana terlambat dan gagal diusulkan remisi	5
9	WBP terlambat dan tidak bisa diusulkan integrasi	4	28	2	Jumlah narapidana terlambat dan gagal diusulkan integrasi	5
10	WBP kurang mendapatkan pengetahuan dan ilmu untuk mengembangkan potensi dan skill yang dimiliki	20	2	15	Persentase WBP yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan potensi	10%
11	Narapidana tidak memiliki kemampuan dan sertifikat keahlian untuk digunakan saat kembali ke masyarakat	6	24	4	Persentase narapidana yang tidak mempunyai sertifikat keahlian	10%
12	Produktivitas kerja narapidana menurun	6	21	4	Persentase Tingkat penurunan produktivitas kerja narapidana	10%
13	Tidak tersalurkan produk warga binaan pemasyarakatan kepada customer	9	11	6	Persentase produk WBP yang tidak tersalurkan	10%
14	Tertundanya penyelesaian pengaduan masyarakat	15	5	10	Persentase pengaduan yang terlambat ditindaklanjuti	5%
15	Tidak diperpanjangnya masa ijin penggunaan senjata api (untuk pengamanan)	15	10	10	Persentase senjata api yang izin penggunaannya tidak diperpanjang	5%
16	Terjadinya gangguan kamtib (pelarian, perkelahian, kerusakan dan peredaran barang barang terlarang)	15	6	10	Persentase terjadinya gangguan kamtib	5%
17	Risiko terjadinya pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana	12	7	8	Persentase WBP yang melakukan pelanggaran tata tertib	5%

18	Terjadinya pengulangan gangguan keamanan kamtib yang berkembang semakin buruk	12	8	8	Persentase terjadinya pengulangan gangguan kamtib	5%
19	Potensi program yang direncanakan tidak dapat terealisasi tepat waktu	20	3	15	Persentase program yang gagal direalisasikan tepat waktu	10%
20	Dokumen rencana kerja tidak terinput secara tepat waktu	20	4	15	Persentase keterlambatan penyampaian dokumen rencana kerja	10%
21	Terdapat BMN yang rusak dan hilang	6	23	4	Persentase BMN rusak dan hilang	5%
22	Terlambatnya Pengajuan SK Persetujuan Sewa BMN	8	19	4	Persentase keterlambatan pengajuan SK persetujuan Sewa	10%
23	Potensi adanya kekurangan BMN saat akan dilakukan monitoring	8	18	6	Persentase kekurangan BMN saat dilakukan monitoring	10%
24	Banyak pegawai yang tidak memiliki kompetensi penunjang kegiatan kerja	4	26	2	Persentase pegawai yang tidak memiliki kompetensi penunjang kegiatan kerja	5%
25	Belum terlaksananya kenaikan pangkat	5	25	4	Jumlah pegawai yang terlambat naik pangkat	3
26	Penyerapan anggaran dan nilai IKPA belum maksimal	6	22	4	Persentase Penyerapan Anggaran	90%
27	Terlambatnya proses realisasi anggaran	8	13	6	Persentase realisasi anggaran	90%
28	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang ada	8	12	6	Persentase ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan	10%
29	Risiko arsip penting rusak	8	20	6	Persentase jumlah arsip rusak dan hilang	10%
30	Pegawai melakukan pungli dan memasukkan barang barang terlarang ke lapas	20	1	15	Jumlah pegawai meminta pungli dan memasukkan barang-barang terlarang ke lapas	0



Wonogiri, 11 Februari 2026

Kepala,

Siswanto

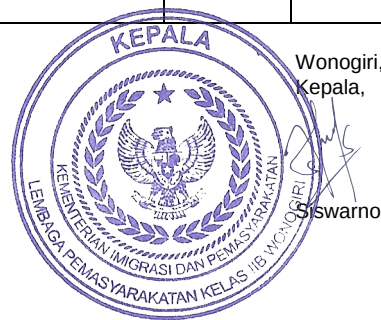
RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
Periode Penerapan : 2026

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase munculnya beban biaya perawatan	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Koordinasi dengan stakeholder untuk mengupayakan jaminan kesehatan bagi WBP	Bebas biaya perawatan	1	Desember	Kalapas, Kasi Binadik Giatja, Kasubbag TU
2	Jumlah narapidana pengidap gangguan mental semakin parah	5	Mengurangi kemungkinan risiko	Bekerja sama dengan stakeholder untuk visitasi psikolog/psikiater	Jadwal visitasi psikolog/psikiater	4	Triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Kalapas, Kasi Binadik Giatja
3	Persentase tidak tertanganinya lansia sakit	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Membuat blok khusus lansia	Tersedia blok khusus perawatan bagi WBP lansia	1	Desember	Kalapas, Kasi Binadik Giatja, Ka. KPLP, Kasubbag TU
4	Persentase terjadinya kecelakaan pada narapidana penyandang disabilitas	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Menyediakan fasilitas dan sarana prasarana bagi WBP penyandang disabilitas	Tersedia fasilitas dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas	1	Desember	Kalapas, Kasi Binadik Giatja, Kasubbag TU
5	Persentase penularan bakteri TB	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Mengadakan kegiatan skrining TB	Jadwal kegiatan skrining TB	4	Triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
6	Jumlah narapidana ODHA yang terlambat memperoleh terapi ARV	3	Mengurangi kemungkinan risiko	Penjadwalan pemberian terapi ARV untuk narapidana ODHA	Jadwal terapi ARV	12	Setiap bulan	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
7	Persentase keaktifan WBP dalam mengikuti kegiatan pembinaan	90%	Mengurangi kemungkinan risiko	Menambah ragam kegiatan pembinaan beserta penyesuaian jadwal kegiatan pembinaan	Jadwal dan laporan kegiatan pembinaan WBP	12	Setiap bulan	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
8	Jumlah narapidana terlambat dan gagal diusulkan remisi	5	Mengurangi kemungkinan risiko	Penjadwalan pengusulan remisi secara lebih akurat dan efektif	Timeline pengusulan remisi	3	Setiap periode pemberian remisi (RU dan RK)	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
9	Jumlah narapidana terlambat dan gagal diusulkan integrasi	5	Mengurangi kemungkinan risiko	Penjadwalan pengusulan integrasi secara lebih akurat dan efektif	Timeline pengusulan integrasi	12	Setiap bulan	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
10	Persentase WBP yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan potensi	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi WBP	Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan WBP	12	Setiap bulan	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja

11	Persentase narapidana yang tidak mempunyai sertifikat keahlian	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi bersertifikasi	Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi bersertifikasi	4	Triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
12	Presentase Tingkat penurunan produktivitas kerja narapidana	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Koordinasi dengan mitra kerja terkait pengadaan sarana dan prasarana kerja WBP	Perjanjian Kerja Sama terkait penyediaan sarana prasarana kerja WBP	1	Agustus	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
13	Persentase produk WBP yang tidak tersalurkan	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Koordinasi dengan mitra kerja terkait peningkatan kualitas produk WBP	Perjanjian Kerja Sama terkait peningkatan kualitas produk WBP	1	Agustus	Kalapas dan Kasi Binadik Giatja
14	Persentase pengaduan yang terlambat ditindaklanjuti	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Membentuk unit layanan pengaduan	Laporan penanganan pengaduan	12	Setiap bulan	Kalapas dan Kasi Adm. Kamtib
15	Persentase senjata api yang izin penggunaanya tidak diperpanjang	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Monitoring Perizinan dan perawatan senjata secara rutin	Laporan Perizinan dan perawatan senjata secara rutin	12	Setiap bulan	Kalapas dan Kasi. Adm. Kamtib
16	Persentase terjadinya gangguan kamtib	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Melaksanakan SOP Pengamanan dan Supervisi; Melaksanakan Kontrol Keliling lapas; Melaksanakan Penggeledahan rutin dan insidentil kamar hunian;	SOP Pengamanan, Laporan pelaksanaan tugas pengamanan; Laporan Penggeledahan Rutin Kamar hunian	360	30 kali setiap bulan	Kalapas, Kasi. Adm. Kamtib dan Ka. KPLP
17	Persentase WBP yang melakukan pelanggaran tata tertib	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Pemberian sanksi hukuman disiplin yang lebih berat untuk WBP yang melakukan pelanggaran berulang; Memindahkan narapidana yang sering melakukan pelanggaran ke UPT lain; Pelaksanaan SOP	Laporan Pelanggaran Narapidana; SOP; Surat Permohonan pemindahan narapidana	12	Setiap bulan	Kalapas, Kasi Adm. Kamtib, dan Ka.KPLP
18	Persentase terjadinya pengulangan gangguan kamtib	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Melaksanakan SOP Pengamanan dan Supervisi; Melaksanakan Kontrol Keliling lapas; Melaksanakan Penggeledahan rutin dan insidentil kamar hunian;	SOP Pengamanan, Laporan pelaksanaan tugas pengamanan; Laporan Penggeledahan Rutin Kamar hunian	360	30 kali setiap bulan	Kalapas, Kasi. Adm. Kamtib dan Ka. KPLP
19	Persentase program yang gagal direalisasikan tepat waktu	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Mengadakan MONEV; Meningkatkan nilai RPD dengan melakukan revisi DIPA yang tepat waktu untuk memperbaiki halaman III DIPA sesuai realisasi dan merencanakan RPD dengan baik; Serta setiap pelaksana kegiatan agar memahami	Laporan pelaksanaan MONEV; Laporan Tindak Lanjut hasil Pelaksanaan MONEV; dan DIPA revisi tepat waktu	4	Triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Kalapas dan Kasubbag TU
20	Persentase keterlambatan penyampaian dokumen rencana kerja	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Berkoordinasi dengan kantor wilayah/unit terkait	Penyampaian dokumen rencana kerja secara tepat waktu; mengusulkan ABT belanja pegawai dengan tepat waktu	1	Setiap akhir tahun	Kalapas dan Kasubbag TU

21	Persentase BMN rusak dan hilang	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Melaksanakan SOP Pemanfaatan BMN, pengecekan rutin kondisi BMN	SOP Pemanfaatan BMN, Laporan Pemeriksaan BMN	4	Triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Kalapas dan Kasubbag TU
22	Persentase keterlambatan pengajuan SK persetujuan Sewa	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Menjadwalkan periode pengajuan sewa	Jadwal pengajuan sewa	2	Setiap periode sewa	Kalapas dan Kasubbag TU
23	Persentase kekurangan BMN saat dilakukan monitoring	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Melaksanakan SOP Pemanfaatan BMN, pengecekan rutin kondisi BMN	SOP Pemanfaatan BMN, Laporan Pemeriksaan BMN	4	Triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Kalapas dan Kasubbag TU
24	Persentase pegawai yang tidak memiliki kompetensi penunjang kegiatan kerja	5%	Mengurangi kemungkinan risiko	Distribusi keikutsertaan pegawai pada kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi	4	Triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Kalapas dan Kasubbag TU
25	Jumlah pegawai yang terlambat naik pangkat	3	Mengurangi kemungkinan risiko	Melaksanakan SOP Kenaikan Pangkat Pegawai, pemantauan terhadap periode kenaikan pangkat pegawai	SOP Kenaikan Pangkat Pegawai, dan timeline proses kenaikan pangkat	2	Setiap periode kenaikan pangkat	Kalapas dan Kasubbag TU
26	Persentase Penyerapan Anggaran	90%	Mengurangi kemungkinan risiko	Optimalisasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan anggaran	Dokumen perencanaan, dokumen pelaporan	2	Semester	Kalapas dan Kasubbag TU
27	Persentase realisasi anggaran	90%	Mengurangi kemungkinan risiko	Optimalisasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan anggaran	Dokumen perencanaan, dokumen pelaporan	2	Semester	Kalapas dan Kasubbag TU
28	Persentase ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Melaksanakan SOP Kegiatan Pelayanan, Meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan	SOP Kegiatan Pelayanan, Indikator survey IPK/IKM sangat baik	12	Setiap bulan	Kalapas, Kasi Binadik Giatja, Kasubbag TU
29	Persentase jumlah arsip rusak dan hilang	10%	Mengurangi kemungkinan risiko	Melaksanakan SOP pengelolaan arsip, menyediakan tempat penyimpanan arsip	SOP Pengelolaan Arsip, Laporan pengelolaan arsip	12	Setiap bulan	Kalapas dan Kasubbag TU
30	Jumlah pegawai meminta pungli dan memasukkan barang-barang terlarang ke lapas	0	Mengurangi kemungkinan risiko	Penguatan Budaya kerja dan peningkatan layanan publik bebas pungli; Pembentukan tim Unit Pengendalian Pungli; Penegakan SOP Penegakkan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan	Laporan Kegiatan pencegahan, penindakan dan pemberian hukuman disiplin terkait pungli;	12	Setiap bulan	Kalapas, Kasi Adm. Kamtib, dan Ka.KPLP



Wonogiri, 11 Februari 2026

Kepala,

Siswarno

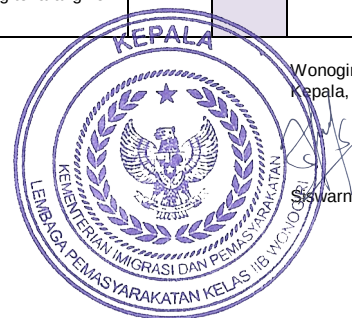
PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri
Periode Penerapan : 2026

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x1	7	8	9	10=(9/8)x	11	12
	Koordinasi dengan stakeholder untuk mengupayakan jaminan kesehatan bagi WBP	Bebas biaya perawatan	1			Persentase munculnya beban biaya perawatan	5%				
	Bekerja sama dengan stakeholder untuk visitasi psikolog/psikiater	Jadwal visitasi psikolog/psikiater	4			Jumlah narapidana pengidap gangguan mental semakin parah	5				
	Membuat blok khusus lansia	Tersedia blok khusus perawatan bagi WBP lansia	1			Persentase tidak tertanganinya lansia sakit	5%				
	Menyediakan fasilitas dan sarana prasarana bagi WBP penyandang disabilitas	Tersedia fasilitas dan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas	1			Persentase terjadinya kecelakaan pada narapidana penyandang disabilitas	5%				
	Mengadakan kegiatan skrining TB	Jadwal kegiatan skrining TB	4			Persentase penularan bakteri TB	5%				
	Penjadwalan pemberian terapi ARV untuk narapidana ODHA	Jadwal terapi ARV	12			Jumlah narapidana ODHA yang terlambat memperoleh terapi ARV	3				
	Menambah ragam kegiatan pembinaan beserta penyesuaian jadwal kegiatan pembinaan	Jadwal dan laporan kegiatan pembinaan WBP	12			Persentase keaktifan WBP dalam mengikuti kegiatan pembinaan	90%				
	Penjadwalan pengusulan remisi secara lebih akurat dan efektif	Timeline pengusulan remisi	3			Jumlah narapidana terlambat dan gagal diusulkan remisi	5				
	Penjadwalan pengusulan integrasi secara lebih akurat dan efektif	Timeline pengusulan integrasi	12			Jumlah narapidana terlambat dan gagal diusulkan integrasi	5				
	Mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi WBP	Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan WBP	12			Persentase WBP yang tidak mengikuti kegiatan pengembangan potensi	10%				

	Koordinasi dengan stakeholder untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi bersertifikasi	Laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi bersertifikasi	4			Persentase narapidana yang tidak mempunyai sertifikat keahlian	10%				
	Koordinasi dengan mitra kerja terkait pengadaan sarana dan prasarana kerja WBP	Perjanjian Kerja Sama terkait penyediaan sarana prasarana kerja WBP	1			Persentase Tingkat penurunan produktivitas kerja narapidana	10%				
	Koordinasi dengan mitra kerja terkait peningkatan kualitas produk WBP	Perjanjian Kerja Sama terkait peningkatan kualitas produk WBP	1			Persentase produk WBP yang tidak tersalurkan	10%				
	Membentuk unit layanan pengaduan	Laporan penanganan pengaduan	12			Persentase pengaduan yang terlambat ditindaklanjuti	5%				
	Monitoring Perizinan dan perawatan senjata secara rutin	Laporan Perizinan dan perawatan senjata secara rutin	12			Persentase senjata api yang izin penggunaannya tidak diperpanjang	5%				
	Melaksanakan SOP Pengamanan dan Supervisi; Melaksanakan Kontrol Keliling Iap; Melaksanakan Penggeledahan rutin dan insidentil kamar hunian;	SOP Pengamanan, Laporan pelaksanaan tugas pengamanan; Laporan Penggeledahan Rutin Kamar hunian	360			Persentase terjadinya gangguan kamtib	5%				
	Pemberian sanksi hukuman disiplin yang lebih berat untuk WBP yang melakukan pelanggaran berulang; Memindahkan narapidana yang sering melakukan pelanggaran ke UPT lain; Pelaksanaan SOP	Laporan Pelanggaran Narapidana; SOP; Surat Permohonan pemindahan narapidana	12			Persentase WBP yang melakukan pelanggaran tata tertib	5%				
	Melaksanakan SOP Pengamanan dan Supervisi; Melaksanakan Kontrol Keliling Iap; Melaksanakan Penggeledahan rutin dan insidentil kamar hunian;	SOP Pengamanan, Laporan pelaksanaan tugas pengamanan; Laporan Penggeledahan Rutin Kamar hunian	360			Persentase terjadinya pengulangan gangguan kamtib	5%				
19	Mengadakan MONEV; Meningkatkan nilai RPD dengan melakukan revisi DIPA yang tepat waktu untuk memperbaiki halaman III DIPA sesuai realisasi dan merencanakan RPD dengan baik; Serta setiap pelaksana kegiatan agar memahami RPD yang	Laporan pelaksanaan MONEV; Laporan Tindak Lanjut hasil Pelaksanaan MONEV; dan DIPA revisi tepat waktu	4			Persentase program yang gagal direalisasikan tepat waktu	10%				
	Berkoordinasi dengan kantor wilayah/unit terkait	Penyampaian dokumen rencana kerja secara tepat waktu; mengusulkan ABT belanja pegawai dengan tepat waktu	1			Persentase keterlambatan penyampaian dokumen rencana kerja	10%				
	Melaksanakan SOP Pemanfaatan BMN, pengecekan rutin kondisi BMN	SOP Pemanfaatan BMN, Laporan Pemeriksaan BMN	4			Persentase BMN rusak dan hilang	5%				
	Menjadwalkan periode pengajuan sewa	Jadwal pengajuan sewa	2			Persentase keterlambatan pengajuan SK persetujuan Sewa	10%				

Melaksanakan SOP Pemanfaatan BMN, pengecekan rutin kondisi BMN	SOP Pemanfaatan BMN, Laporan Pemeriksaan BMN	4		Persentase kekurangan BMN saat dilakukan monitoring	10%				
Distribusi keikutsertaan pegawai pada kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi	Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi	4		Presentase pegawai yang tidak memiliki kompetensi penunjang kegiatan kerja	5%				
Melaksanakan SOP Kenaikan Pangkat Pegawai, pemantauan terhadap periode kenaikan pangkat pegawai	SOP Kenaikan Pangkat Pegawai, dan timeline proses kenaikan pangkat	2		Jumlah pegawai yang terlambat naik pangkat	3				
Optimalisasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan anggaran	Dokumen perencanaan, dokumen pelaporan	2		Persentase Penyerapan Anggaran	90%				
Optimalisasi proses perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan anggaran	Dokumen perencanaan, dokumen pelaporan	2		Persentase realisasi anggaran	90%				
Melaksanakan SOP Kegiatan Pelayanan, Meningkatkan kualitas fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan	SOP Kegiatan Pelayanan, Indikator survey IPK/IKM sangat baik	12		Presentase ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan	10%				
Melaksanakan SOP pengelolaan arsip, menyediakan tempat penyimpanan arsip	SOP Pengelolaan Arsip, Laporan pengelolaan arsip	12		Persentase jumlah arsip rusak dan hilang	10%				
Penguatan Budaya kerja dan peningkatan layanan publik bebas pungli; Pembentukan tim Unit Pengendalian Pungli; Penegakan SOP Penegakkan hukuman disiplin bagi pegawai yang melakukan pelanggaran	Laporan Kegiatan pencegahan, penindakan dan pemberian hukuman disiplin terkait pungli;	12		Jumlah pegawai meminta pungli dan memasukkan barang-barang terlarang ke lapas	0				



Wonogiri, 11 Februari 2026

Kepala,

Suwarno